

**DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2013-2017**

**Avillya Irfian Septyaningarum**

**Email : [avillya16@gmail.com](mailto:avillya16@gmail.com)**

**Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Telp: 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax: 0274 387649

***ABSTRACT***

*Poverty is one of problems which appearing in society life, effort in decreasing poverty cannot do partial but it should be related to various aspects related itself. This study aims to analyze the Determinant of Poverty in Regency/Cities in the West Java Province the Period 2013-2017. The dependent variable in this study is poverty and the independent variable in this study consist of four variable is Gross Regional Domestic Product (GRDP), Education, Local Expenditures and Fund Allocated of Public. The analytical method used regression of panel data with using fixed effect approach. The results showed that the variables Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Fund Allocated of Public have significantly negative effect to poverty in regency/cities in the West Java Province. Contrary, the variables Education and Local Expenditures have significantly positive effect to poverty in regency/cities in the West Java Province. In this study it is necessary to add independent variables to strengthen the result of the study.*

**Keywords** : *Poverty, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Education, Local Expenditures, Funds Allocated of Public.*

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi persoalan mendasar bagi pemerintahan di negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan menjadi gambaran suatu kehidupan berbagai negara berkembang dalam mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Permasalahan kemiskinan diakibatkan oleh suatu kondisi nasional pada negara dan situasi global. Persoalan mengenai kemiskinan begitu kompleks sehingga membutuhkan perhatian serta intervensi dari berbagai pihak yang dilakukan secara bersama dan terkoordinasi. Sehingga apabila kemiskinan hanya disentuh dan upaya untuk

penyelesaiannya hanya dilakukan oleh sedikit pihak tanpa adanya koordinasi yang efektif, maka hal tersebut akan menjadi terasa berat dan tidak mudah.

Kemiskinan merupakan sebagian besar masalah yang dihadapi seluruh belahan dunia terutama kerap terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan terjadi bukan hanya bersangkutan dengan orang yang tidak mampu untuk mencukupi hidupnya secara layak maupun tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya namun juga bersangkutan dengan adanya suatu ketimpangan pada penghasilan antar masing-masing penduduk (Hudiyanto, 2014).

Persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi pada ketimpangan serta pengangguran melainkan juga merupakan salah satu masalah klasik yang besar serta mendasar untuk negara-negara berkembang di dunia misalnya seperti negara Indonesia. Ada beberapa ahli dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial yang telah mengembangkan dan menciptakan formulasi dengan membuat berbagai jenis indikator dan parameter digunakan untuk menghitung pada jumlah penduduk dan mengukur tingkat kemiskinan berbagai negara (Hudaya, 2009).

Banyak negara yang berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga optimal dan mengurangi angka kemiskinan. Namun kondisi yang tidak tercapai pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia, karena pada saat terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi disisi lain juga akan diiringi masalah meningkatnya jumlah penduduk yang hidup pada bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, akan dilakukan upaya secara menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan terutama penyebab kemiskinan tersebut. Ada beberapa faktor upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang harus disempurnakan, seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Sehingga dengan dilakukannya pembangunan yang bertujuan mewujudkan kemakmuran pada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah

pembangunan misalnya kemiskinan, dan pembangunan dilakukan menurut keutamaannya serta kebutuhan pada masing-masing daerah dengan tujuan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan pada jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam *Anatomi kemiskinan (2013)*, suatu tindakan pemerintah yang sudah dilakukan beberapa waktu dalam menurunkan tingkat kemiskinan hanya sebatas langkah untuk konteks pendekatan ekonomi yang beroperasi, sehingga pada program rencana pembangunan yang sudah di rencanakan belum beroperasi sesuai dengan rencana, ada kesan yang kuat untuk cara pandang pemerintah dalam upaya problematika kemiskinan yang terjadi, meskipun sekadar mendapatkan gambaran apabila masalah yang terjadi saat ini hanya sebatas persoalan tingkat pendapatan yang rendah. Seperti halnya saat ini terdapat berbagai macam program pemerintah umumnya yang hanya sebatas menyokong bantuan dalam bentuk modal, subsidi dan sebagainya (Karniji dkk, 2000).

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar dalam kategori negara berkembang. Di negara Indonesia, jumlah penduduk miskin yang dimiliki tercatat masih banyak dan sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di perdesaan namun akses yang dimiliki sangat sulit, sedangkan di daerah perkotaan Jawa Barat penduduk miskin yang tinggal disana tersebar cukup banyak.

Dalam al-qur'an dikelompokkan berbagai bentuk kata untuk pengungkapan miskin, yaitu *mushaf*, makiah, tertib *nuzul*, serta madaniah. Pada surah Ar-Rum [30/84]: 38 berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.”*

Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan Indonesia dimana pembangunannya pada wilayah ini terbilang relatif cepat saat ini jika harus dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Dibalik pembangunan yang cepat, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya (Ardianto, 2016).

Pusat pembangunan ekonomi yang terletak di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Pada data Badan Pusat Statistik mengenai persoalan kemiskinan di Indonesia terutama pada Pulau Jawa, seperti di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan saat ini pertumbuhan ekonomi yang berada di Pulau Jawa hanya dirasakan berbagai golongan masyarakat tertentu dan tidak menyeluruh ke semua masyarakat.

Pada tabel 1.1 di bawah ini menyatakan persentase penduduk miskin yang berada di Pulau Jawa tahun 2013-2017. Secara umum data di atas dari tahun 2013 sampai 2017 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa pada setiap tahunnya mengalami penurunan.

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2013-2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Rata-Rata</b>
DKI Jakarta	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,79
<b>Jawa Barat</b>	<b>9,61</b>	<b>9,18</b>	<b>9,57</b>	<b>8,77</b>	<b>7,83</b>	<b>8,99</b>
Jawa Tengah	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	13,35
DI Yogyakarta	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	13,64
Jawa Timur	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	12,07
Banten	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2018, Diolah

Rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Jawa yang tertinggi terletak di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 13,64 persen, sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin yang terendah terletak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,79 persen. Rata-rata

persentase penduduk miskin yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,35 persen. Provinsi Jawa Timur rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 12,07 persen, sedangkan pada Provinsi Banten rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 5,62 persen. Provinsi Jawa Barat rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 8,99 persen, dimana terletak pada urutan terbesar ke empat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sedangkan pada tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan rata-rata kemiskinan nasional tahun 2013-2017, dimana rata-rata kemiskinan nasional ini diambil dari 34 Provinsi yang terletak di Indonesia. Jika dibandingkan rata-rata kemiskinan nasional dengan Provinsi Jawa Barat, maka akan terlihat bahwa kemiskinan yang di Jawa Barat di bawah rata-rata kemiskinan nasional. Pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat kemiskinannya mencapai 9,61 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasionalnya sebesar 11,47 persen, tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mencapai 9,18 persen sedangkan untuk rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,96 persen, tahun 2015 meningkat mencapai 9,57 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional 11,13 persen, tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 8,77 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,70 persen, dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,83 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen.

**Tabel 1. 2 Rata-rata Kemiskinan Nasional Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Kemiskinan Nasional (%)</b>
2013	11,47
2014	10,96
2015	11,13
2016	10,70
2017	10,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Menurut Badan pusat Statistik rata-rata pada jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.288,52 ribu jiwa, sedangkan rata-rata pada persentase penduduk miskin sebesar 9,02 persen.

Keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berada di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pengaruh positif. Sehingga dapat dilihat melalui tabel 1.3 di bawah ini pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Jawa Barat untuk setiap tahunnya mengalami penurunan.

**Tabel 1. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2013	4.375,17	9,61
2014	4.238,96	9,18
2015	4.435,70	9,53
2016	4.224,32	8,95
2017	4.168,44	7,83

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat 2018, Diolah

Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 4.375,17 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 9,61 persen, tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 4.238,96 ribu jiwa dan mengalami penurunan sebesar 9,18 persen, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,53 persen dengan jumlah penduduk miskin yang dimiliki sebanyak 4.435,70 ribu jiwa, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 8,95 persen dan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 4.224,32 ribu jiwa, dan mengalami penurunan lagi hingga 7,83 persen pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.168,44 ribu jiwa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu, PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk keberhasilan dalam pembangunan dan syarat keharusan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Terdapat syarat kecukupannya yaitu apabila pertumbuhan ekonomi terbilang efektif untuk mengurangi

tingkat kemiskinan. Dimana apabila pertumbuhan bermaksud untuk menyebar pada setiap golongan pendapatan, terutama pada golongan penduduk miskin. Untuk secara langsung, hal tersebut bahwa pertumbuhan perlu dibuktikan yang terjadi di sektor-sektor pada saat penduduk miskin bekerja yakni sektor pertanian maupun sektor yang pada kerja. Sedangkan untuk secara tidak langsung, dibutuhkan pemerintah yang cukup efektif untuk mendistribusikan manfaat pertumbuhan sehingga didapatkan dari sector modern misalnya jasa yang padat modal (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Di bidang pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan suatu kemampuan bagi negara berkembang ketika menyerap ilmu dalam mempergunakan teknologi modern serta mengembangkan kapasitas untuk terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan secara vital dimana input berfungsi dalam produk agregat (Todaro, 2011). Pendidikan mampu mempengaruhi sebagian besar pendapatan orang-orang yang berpendidikan serta meningkatkan nilai produksi pada suatu perekonomian. Apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh pada pendapatan yang nanti diterimanya. Sementara itu, pendidikan juga berpengaruh terhadap seseorang yang mampu membaca, berpendapat, berkomunikasi serta orang tersebut akan lebih dipertimbangkan untuk orang lain dan sebagainya. Sehingga pendidikan sangatlah berperan penting dalam upaya pembangunan perekonomian (Todaro, 2011).

Selain pendidikan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu belanja daerah. Bahwa belanja modal, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa menjadi bagian dari belanja yang akan mendukung adanya kegiatan pembangunan, dimana salah satunya merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Penurunan dari jumlah kemiskinan menjadi salah satu kebijakan dari program nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cepat (Riko Tri Fasholla, 2018).

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap kemiskinan yaitu DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan membiayai kebutuhan untuk pengeluaran pemerintah daerah yang menjadi pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya Dana Alokasi Umum pemerintah daerah menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan, Provinsi Jawa Barat termasuk relatif bagus dibandingkan rata-rata nasional kemiskinan. Upaya yang dapat diterapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan perlu diketahuinya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga akan memperoleh rumusan suatu kebijakan secara efisien dalam menanggulangnya.

Berdasarkan fenomena keberhasilan kemiskinan yang ada di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan mengajukan penelitian yang berjudul “Determinan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017”.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## **HIPOTESIS**

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
2. Diduga variabel Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
3. Diduga variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.
4. Diduga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017.

## **METODE PENELITIAN**

Obyek dari penelitian ini adalah 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang meliputi: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pendidikan, Belanja Daerah, dan DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya akan tetapi melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat serta buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan melalui website sehingga dapat membantu jalannya penelitian ini dengan baik.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan sebagai pengolah datanya menggunakan aplikasi *Eviews9*. Metode data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Adapun bentuk analisis regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Log(KMS)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log(PDRB)} + \beta_2 \text{PEND} + \beta_3 \text{Log(BD)} + \beta_4 \text{Log(DAU)} + et$$

Keterangan:

LogKMS	= Kemiskinan
LogPDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
PEND	= Pendidikan
LogBD	= Belanja Daerah
LogDAU	= Dana Alokasi Umum
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_{1-4}$	= Koefisien Parameter
et	= Disturbance Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemilihan Model Terbaik

#### 1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk membandingkan maupun memilih mana model terbaik yaitu antara *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*.

$H_0$  : *Common Effect*

$H_1$  : *Fixed Effect*

Pada pengambilan keputusan ini melalui cara dengan melihat nilai probabilitas ( $p$ ) untuk Cross-Section F. Apabila nilai  $p < 0,05$  maka model tersebut akan terpilih

*Fixed Effect Model*. Akan tetapi, apabila  $p > 0,05$  maka model tersebut akan terpilih *Common Effect Model*.

**Tabel 5. 1 Hasil Uji Chow**

<b>Effect Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f</b>	<b>Prob.</b>
<b>Cross-section F</b>	191.820782	(25, 100)	0.0000
<b>Cross-section Chi-square</b>	505.817715	25	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menyatakan bahwa dari kedua nilai probabilitas Cross-section F dan Chi-square hasilnya adalah lebih kecil dari Alpha 0,05 yang artinya menolak hipotesis nol. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model yang terbaik untuk digunakan yaitu metode *Fixed Effect Model*. Berdasarkan dari hasil uji chow yang menolak uji hipotesis nol, maka pengujian data akan dilanjutkan ke uji hausman.

## 2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan maupun memilih mana model terbaik yaitu antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Chi-square* dan dalam keadaan model *Random Effect*.

Ho : *Random Effect*

H1 : *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas dari Chi-square lebih besar dari alpha 0,05 maka Ho ditolak, sehingga model terbaik yang akan dipilih dan digunakan yaitu *Fixed Effect*.

Berikut ini merupakan hasil estimasi dengan menggunakan uji hausman yaitu:

**Tabel 5. 2 Hasil Uji Hausman**

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f</b>	<b>Prob.</b>
<b>Cross-section random</b>	126.698209	4	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 5.4 hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0000 kurang dari alpha 0,05. Sehingga Ho ditolak sementara dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dan digunakan yaitu model *Fixed Effect*.

## B. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji park, apabila probabilitas  $\alpha \leq 0,05$  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan apabila  $\alpha \geq 0,05$  maka Ha ditolak dan H0 diterima (H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas). Berikut merupakan output hasil dari uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji park sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	0.403453	0.684966	0.589012	0.5574
<b>LOG(PDRB)</b>	-0.074239	0.041176	-1.802974	0.0748
<b>PEND</b>	-0.009654	0.013747	-0.702277	0.4844
<b>LOG(BD)</b>	0.017877	0.015307	1.167880	0.2460
<b>LOG(DAU)</b>	0.047534	0.027118	1.752852	0.0831

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa pada data yang digunakan sebagai data independen tidak terdapat masalah heroskedastisitas dengan nilai probabilitas  $> 0,05$ , sehingga masing-masing data terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini variabel dependen berubah menjadi RESID01.

### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui adanya suatu hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. *Rule of Thumb* dalam metode ini yaitu apabila koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,9 maka diperkirakan terdapat

multikolinearitas dalam model penelitian. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi relatif rendah maka diperkirakan tidak terdapat multikolinearitas dalam model tersebut (Ajija et al, 2011).

**Tabel 5. 4 Uji Multikolinearitas**

	<b>LOG(PDRB)</b>	<b>PEND</b>	<b>LOG(BD)</b>	<b>LOG(DAU)</b>
<b>LOG(PDRB)</b>	1.000000	0.142573	0.794905	0.552823
<b>PEND</b>	0.142573	1.000000	0.008075	-0.359190
<b>LOG(BD)</b>	0.794905	0.008075	1.000000	0.867946
<b>LOG(DAU)</b>	0.552823	-0.359190	0.867946	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa pada koefisien korelasi antar variabel independen  $< 0,9$ . Sehingga diartikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

C. Hasil Estimasi Model Data Panel

**Tabel 5. 5 Hasil Estimasi Model Fixed Effect**

<b>Variabel dependen : Kemiskinan</b>	<b>Model</b>
	<b>Fixed Effect</b>
<b>Konstanta (C)</b>	20.44887
Standar Error	1.475432
Probabilitas	0.0000
<b>LOG(PDRB)</b>	-0.371878
Standar Error	0.094367
Probabilitas	0.0002
<b>PEND</b>	0.072480
Standar Error	0.029214
Probabilitas	0.0148
<b>LOG(BD)</b>	0.094378
Standar Error	0.031288
Probabilitas	0.0032
<b>LOG(DAU)</b>	-0.145768
Standar Error	0.065053
Probabilitas	0.0273
<b>R<sup>2</sup></b>	0.999049
<b>F-statistik</b>	3622.660
<b>Prob (F-stat)</b>	0.000000
<b>Durbin-Watson Stat</b>	2.124848

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan hasil estimasi di atas, maka dapat dijabarkan model analisis data panel terhadap analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan, belanja daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sehingga diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log(KMS)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log(PDRB)} + \beta_2 \text{PEND} + \beta_3 \text{Log(BD)} + \beta_4 \text{Log(DAU)} + \text{et}$$

$$\text{Log(KMS)} = 20.44887 - 0.371878 * \text{PDRB} + 0.072480 * \text{PEND} + 0.094378 * \text{BD} + 0.145768 * \text{DAU} + \text{et}$$

$\beta_0$  : Nilai 20.44887 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (PDRB, pendidikan, belanja daerah, dan dana alokasi umum) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan sebesar 20.448 persen

$\beta_1$  : Nilai dari 0.371878 dapat diartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.371 persen

$\beta_2$  : Nilai dari 0.072480 dapat diartikan bahwa pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 tahun, maka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.072 tahun

$\beta_3$  : Nilai dari 0.094378 dapat diartikan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.094 persen

$\beta_4$  : Nilai dari 0.145768 dapat diartikan bahwa dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.145 persen

#### D. Uji Statistik

##### 1. Uji t

Berikut ini merupakan hasil estimasi uji t-statistik yang telah dilakukan menggunakan model *Fixed Effect*:

**Tabel 5. 6 Hasil Uji t-statistik**

Variabel	Coef.	t-statistik	Prob.	Sig.
<b>PDRB</b>	-0.371878	-3.940749	0.0002	5%
<b>Pendidikan</b>	0.072480	2.480963	0.0148	5%
<b>Belanja Daerah</b>	0.094378	3.016410	0.0032	5%
<b>Dana Alokasi Umum</b>	-0.145768	-2.240750	0.0273	5%

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9.0

Berdasarkan dari tabel 5.7 di atas dapat disimpulkan hasil t-statistik untuk variabel independen sebagai berikut:

1. Pengaruh Produk Domestik regional Bruto terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dari hasil regresi menyatakan bahwa variabel PDRB memiliki nilai koefisien sebesar -0.371878 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002 yang artinya signifikan  $\alpha = 5\%$ .
2. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dari hasil regresi menyatakan bahwa variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 0.072480 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0148 yang artinya signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dari hasil regresi menyatakan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0.094378 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0032 yang artinya signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dari hasil regresi menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar -0.145768 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0273 yang artinya signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

## 2. Uji F

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur seberapa besar signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Berdasarkan tabel 5.6 olah data yang diperoleh nilai F-statistik sebesar 3622.660 dengan nilai probabilitas yang dimiliki sebesar 0.000000 (signifikansi pada 5%). Apabila dilihat melalui nilai probabilitasnya maka hasil yang diperoleh lebih kecil dari angka 5 persen, sehingga hasil uji F dinyatakan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel PDRB, pendidikan, belanja daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil regresi dari pengaruh PDRB, pendidikan, belanja daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017 yang dapat dilihat melalui tabel 5.6 diperoleh  $R^2$  sebesar 0.999049. Sehingga hal tersebut menyatakan bahwa 99,90% yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lainnya di luar model tersebut.

## E. Interpretasi/ Pembahasan

### 1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar  $-0.371878$  terhadap kemiskinan, yang artinya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.371878 persen di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sesuai

dengan perkiraan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan maka hipotesis diterima.

Jika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan meningkat juga potensi sumber pendapatan daerah tersebut. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi PDRB maka semakin sejahtera penduduk di suatu wilayah. Dapat disimpulkan jumlah penduduk miskin akan berkurang (Thamrin, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Angga Tri Widiastusi, 2016) menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui regresi linier berganda. Kemudian ada juga penelitian (Dama dkk, 2016) menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado, dimana mempunyai peranan penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Wishnu Adi Saputra, 2011) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

PDRB yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu apabila pertumbuhan output suatu daerah mengalami peningkatan berarti terjadi adanya kenaikan produksi, dimana peningkatan produksi tersebut akan memperluas suatu lapangan pekerjaan, maka akan menurunkan jumlah pengangguran, dimana penurunan dari jumlah pengangguran tersebut menandakan bahwa banyak penduduk yang terserap dalam dunia kerja sehingga akan berdampak terjadinya penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## 2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0.072480 terhadap kemiskinan, yang artinya apabila terjadi kenaikan pendidikan sebesar 1 tahun, maka kemiskinan meningkat sebesar 0.072480 persen di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai dengan perkiraan bahwa variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan maka hipotesis ditolak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harlik dkk, 2013) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi” dimana hasil tersebut bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Agustina dkk, 2018) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh” dimana hasil yang diperoleh bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga tingkat pendidikan belum mampu menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Pendidikan yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu bahwa rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat hanya sampai pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, dimana pendidikan seseorang di daerah tersebut hanya 5 sampai 10 tahun baik di kabupaten maupun kota. Penyebab kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yaitu kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Walaupun tingkat pendidikannya tinggi akan tetapi jika ekonomi Jawa Barat kurang memadai maka kemiskinan juga

akan tetap meningkat, sehingga masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan tingkat pendidikan dengan baik.

Apabila seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka kualitas dari sumber daya manusia (SDM) akan menurun dan dapat mempengaruhi produktivitas. Ketika produktivitas tersebut belum meningkat maka pendapatan juga akan menurun, sehingga hal ini tidak dapat mengurangi kemiskinan.

### 3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0.094378 terhadap kemiskinan, yang artinya apabila terjadi kenaikan belanja daerah sebesar 1 juta rupiah, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.094378 persen di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai dengan perkiraan bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan maka hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Riko Tri Fasholla, 2018) yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap” dimana hasil tersebut bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan. Hubungan dari kedua antar variabel tersebut positif karena belanja daerah di Kabupaten Cilacap distribusinya belum merata serta tidak tepat pada sasaran.

Belanja daerah yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu bahwa distribusi belanja daerah belum tepat pada sasaran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Belanja daerah tidak menciptakan multiplier yang baik seperti investasi yang produktif. Sehingga belanja daerah tidak

menciptakan lapangan kerja pada bidang-bidang tertentu maupun investasi. Pemerintah daerah lebih banyak untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan.

#### 4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar  $-0.145768$  terhadap kemiskinan, yang artinya apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1 juta rupiah, maka kemiskinan akan menurun sebesar  $0.145768$  di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan perkiraan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan maka hipotesis diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhamad Taher Jamco, 2015) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara” dimana hasil tersebut bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadinya peningkatan pada infrastruktur maka akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dana alokasi umum yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu bahwa dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat digunakan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah. DAU dapat digunakan secara efektif serta efisien untuk pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu

mempercepat pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan, disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada hasil analisis yang dilakukan penulis menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel PDRB sesuai dengan hipotesis yang artinya pertumbuhan output suatu daerah mengalami peningkatan berarti terjadi adanya kenaikan produksi, dimana peningkatan produksi tersebut akan memperluas suatu lapangan pekerjaan, maka akan menurunkan jumlah pengangguran.
2. Hasil penelitian pada variabel Pendidikan menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai maka hipotesis ditolak, yang artinya penyebab kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yaitu kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Walaupun tingkat pendidikannya tinggi akan tetapi jika ekonomi Jawa Barat kurang memadai maka kemiskinan juga akan tetap meningkat, sehingga masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan tingkat pendidikan dengan baik.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai maka hipotesis ditolak, yang artinya belanja daerah tidak menciptakan multiplier yang baik seperti investasi yang produktif. Sehingga

belanja daerah tidak menciptakan lapangan kerja pada bidang-bidang tertentu maupun investasi. Pemerintah daerah lebih banyak untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan.

4. Dana Alokasi Umum pada hasil analisis yang dilakukan penulis menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel DAU sesuai dengan hipotesis yang artinya DAU digunakan secara efektif serta efisien untuk pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan, disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melaksanakan pembangunan yang dapat berorientasi terhadap pemerataan pendapatan dengan dilakukannya upaya peningkatan PDRB khususnya mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah, sehingga hasil pemerataan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus mengecek penyebab kemiskinan di wilayah tersebut, selain itu pemerintah daerah juga berperan dalam pemberlakuan wajib belajar selama 12 tahun. Sehingga masing-masing wilayah dapat merasakan pendidikan.
3. Pemerintah diharapkan dalam belanja daerah lebih dikeluarkan untuk investasi yang lebih produktif dan cepat dalam jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan DAU secara merata tidak hanya untuk belanja pegawai dan jasa saja. DAU juga harus digunakan untuk membenahi bidang kesehatan, pemukiman daerah, dan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adepoju, A. 2018. *Determinants of Multidimensional Poverty Transitions among Rural Households in Negeria*. Journal of Agricultural Economics.
- Agus, Widarjono. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Ajija, Schochrul R et al. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alrakhman, M. Dikko. 2011. (Pentingnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai Dana Perimbangan dalam Kerangka Otonomi Daerah).
- Ardianto. 2016. Pengaruh Pengangguran, IPM, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah*. Hal. 115-120.
- Arsyad, Lincoln. 2004. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Edisi Keempat. Yogyakarta: media Widya Mandal.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2002-2016*. BPS Jabar.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2012-2017*. BPS Jatim.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2012-2017*. BPS Jabar.
- Badan pusat Statistik. *Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2011-2017*. BPS Jabar.
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, 2013-2018*. BPS Jabar.
- Badan Pusat Statistik. *Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2016*. BPS Jabar.
- Badan Pusat Statistik. *Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, 2010-2017*. BPS Jabar.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2017*. BPS Jabar.
- Basuki, A. T. 2014. *ELECTRONIC DATA PROCESSING (SPSS 15 dan EViews 7)*, Yogyakarta: Danisa Media.

- Bijla, Shweta. 2018. *Dynamic Poverty Processes in Rural India and the Role of Livestock*. Journal of Agricultural Economics, p. 9-16.
- Fasholla, Riko T. 2018. *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Fatony, Achmad. 2011. *Kebijakan Berbasis participator Proverty Assesment, Kasus Yogyakarta*. Jurnal: Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic Econometrics*, Fourth edition, Singapore, McGraw-Hill Inc.
- Gujarati, D. N. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta. Erlangga.
- Handayani, Asih. 2018. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2015*. Jurnal EKBIS-Vol. 19, No. 1.
- Hudaya. 2009. *Pengentasan Kemiskinan Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Islamy, Leode. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)*.
- Ismuningsih, Atik. 2010. *Faktor Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Melek Huruf, dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004 – 2009*. Jurnal: UPN “Veteran”. Dipublikasikan.
- Istifaiyah, Lailatul. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013*, *Jurnal Ilmiah*, hal. 1-19.
- Joshi, P. K. 2016. *Pathways to Improve Food Security and Reduce Poverty in Emerging India*. Journal of Agricultural Economics-Vol. 29, p. 171-182.
- Kadji, Yulianto. 2009. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Tiga Aspek Kemiskinan*. Yogyakarta: FE UII.
- Mardimin, Yohanes. 1996. *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

- Oktaviani, Atika N. 2018. *Pengaruh Pinjaman daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*. Economics Development Analysis Journal-Vol. 7, No. 3.
- Pandey, Ghansyam. 2018. *Tackling Poverty and Inequality Among Farm Households in Bihar: Implications for Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)*. Journal of Agricultural Economics, p. 17-24.
- Puspita, Dita W. 2015. *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Economics and Policy, hal. 100-107.
- Salim, Emil. 1980. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta:Yayasan Idayu.
- Saragih, Juli, Panglima. 2014. *Faktor Penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah JESP-Vol. 6, No. 2.
- Sari, Novita I. 2018. *Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014*. Economics Development Analysis Journal-Vol. 7, No. 2.
- Sembiring, Rahmad. 2018. *Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan pada Masyarakat Desa Pahlawan*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik-Vol. 3, No.1.
- Suharsimi. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Buku I*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Sukmaraga, Prima. 2011. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di prov. Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmiah*, hal. 22-26.
- Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, Michael, P. 2006. *Pembangunan Ekonomi edisi ke 3*. (Terjemahan Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Widarjo, Wahyu et al. 2009. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Otomotif*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 11, No. 2.
- Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Edisi ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yuliani, Tutik. 2018. *Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2008-2015*. Jurnal Edueco-Vol. 1, Nomor 2.